

BAB II

DESKRIPSI KEPEMIMPINAN JOKOWI DAN TRANSFORMASI

KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL: PERAN DAN PENGARUH SEKTOR

TERKAIT

2.1. Jokowi, Aktor Utama dalam Perubahan Sikap Indonesia pada Pelaksanaan Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel Mentah

Teori Idiosinkratik oleh Margaret Hermann memfokuskan penelitian pada individu yang dianggap memiliki seperangkat hak dan kewenangan, atau yang paling mempengaruhi keputusan mengenai bagaimana negara harus bersikap atau berperilaku dalam menghadapi berbagai kondisi atau tekanan dari lingkungan sekitar (Hermann, 1980). Dengan kata lain, istilah ‘individu’ dalam konteks ini merujuk pada aktor utama yang memegang hak dan kewenangan tersebut..

Jabatan Presiden memenuhi kriteria tersebut sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Presiden Indonesia memiliki hak dan kewenangan signifikan dalam mempengaruhi dan menetapkan kebijakan luar negeri. Hak dan kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa presiden berwenang dalam mengadakan dan menjalankan urusan Hubungan dan Politik Luar Negeri Indonesia; UUD Tahun 1945 Pasal 11 ayat 1, yang memberikan hak kepada presiden untuk mengusulkan keputusan mengenai pengadaan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 1999) (MKRI).

Dengan demikian, Presiden Jokowi, yang menjabat pada masa ketika Indonesia menunjukkan sikap lebih berani dalam menghadapi tekanan eksternal terkait kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah, merupakan aktor utama sesuai dengan teori idiosinkratik oleh Margaret Hermann. Hal ini dapat didukung pula dengan beberapa alasan dan bukti berikut:

2.1.1. Alasan dalam Aspek Konstitusi

Aspek konstitusi mendukung anggapan bahwa Presiden Jokowi adalah aktor utama perubahan sikap Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Presiden memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pengesahan peraturan menteri (Permendag, 2023). Ini terkait dengan beberapa Peraturan Menteri yang dikeluarkan dalam rangka kebijakan hilirisasi nikel. Pengesahan oleh Presiden tidak terlepas dari pertimbangan dan penilaian atas kelayakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Margaret Hermann, semua masukan atau saran dari pihak lain pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh Presiden atau pemimpin tertinggi dalam pengambilan keputusan (Hermann, 1999)

2.1.2. Bukti Pernyataan Pendukung dari Beberapa Tokoh.

2.1.2.1. Tokoh yang pernah berinteraksi secara langsung dengan Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa program hilirisasi melalui pelarangan ekspor nikel mentah adalah warisan terbaik Jokowi untuk generasi mendatang (Kompas, 2023). Perdana Menteri Malaysia periode 2018–2020, Mahathir Mohamad, dalam wawancara dengan CNN, memuji Jokowi sebagai pemimpin luar biasa dan

mencatat kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi yang melebihi Malaysia dalam beberapa sektor (CNN, 2017).

2.1.2.2. Tokoh Pengamat atau Aktivis

Seorang aktivis angkatan 66', peneliti senior sekaligus pendiri lembaga survei CSIS, Jusuf Wanandi, memberikan pandangannya terhadap kepemimpinan dua presiden yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. Menurutnya era kepemimpinan SBY lebih terlihat banyak keragu-raguan dan kurang memiliki nyali sebagaimana ia mengatakan "*you can see, no guts*". Sedangkan dalam kepemimpinan Jokowi, ia berpandangan bahwa Jokowi tidak hanya memiliki nyali, tetapi juga berusaha keras untuk mencapai tujuannya dan mempertahankan hasil kerjanya agar tidak sia-sia setelah masa kepemimpinannya. Selain itu, menurutnya, Jokowi tidak termasuk dalam kategori pemimpin *lame duck* atau pemimpin yang kehilangan pengaruh di akhir masa jabatannya karena ia melihat Jokowi sebagai seorang yang penuh antusiasme (Kompas TV Sukabumi, 2023).

2.1.3. Bukti lainnya

Pernyataan langsung dari Australia mengenai kemajuan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dalam hilirisasi nikel disampaikan melalui pertemuan kunjungan. Selain itu, IMF juga meminta penghapusan proyek hilirisasi nikel yang menjadi andalan Jokowi (CNBC, 2023) (CNBC, 2023).

Perintah yang dikeluarkan oleh Jokowi kepada setiap perusahaan swasta maupun BUMN yang bergerak dalam sektor minerba untuk melakukan hilirisasi guna menambah nilai komoditas, dorongan untuk terus melakukan hilirisasi

terhadap bahan tambang selain nikel, pengutusan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melawan gugatan Uni Eropa, serta pengeluaran perintah kepada jajarannya untuk mempersiapkan pengacara terbaik menghadapi gugatan Uni Eropa, dan instruksi untuk mengajukan banding atas kekalahan Indonesia di WTO (CNBC, 2021) (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022) (CNBC, 2023) (CNN, 2019) (CNN, 2022).

Dengan demikian, melalui beberapa alasan dan bukti di atas, penulis menetapkan bahwa Presiden Jokowi adalah tokoh utama dalam keberlanjutan dan perubahan sikap Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Bukti-bukti tersebut menunjukkan peran sentral Jokowi dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi terkait hal ini.

2.2. Perjalanan Karir Joko Widodo

Teori Idiosinkratik oleh Margaret Hermann tidak hanya mengungkapkan tipe gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin terhadap suatu kebijakan, tetapi juga mampu memprediksi pola tindakan dan hasil pekerjaan pemimpin di masa depan (Hermann, 1999). Singkatnya, teori ini muncul dari ketertarikan Hermann untuk memahami perbedaan tindakan yang ditunjukkan oleh berbagai pemimpin dunia dalam menghadapi situasi sulit atau krisis serupa, seperti Perang Dunia I (Academicus TR, 2021). Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap faktor pembeda sebagai dasar untuk memprediksi pola tindakan dan hasil kerja seorang pemimpin.

Jokowi menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan pemimpin sebelumnya, terutama dalam hal prestasi dan metode pemecahan masalah yang

jarang atau belum pernah diperlihatkan oleh pendahulunya. Bagian ini membahas gambaran umum karier dan pencapaian politik Jokowi, yang menjadi faktor pembeda dari tokoh politik sebelum masa jabatannya. Pencapaian ini merupakan salah satu unsur pendukung yang dapat dijadikan dasar untuk mengindikasikan perubahan dalam pola menjalankan tugas dan hasil pekerjaan sesuai dengan jabatan yang sedang atau akan dijabatnya, selain unsur kepribadian.

2.2.1. Gambaran Umum Karier Joko Widodo

Joko Widodo, atau Jokowi, lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengusaha mebel yang berbasis di Solo dengan perusahaan furnitur bernama PT Rakabu Sejahtera (CNBC, 2024). Dalam perjalanan karier politiknya, Jokowi telah menjabat berbagai posisi, mulai dari Wali Kota hingga Presiden. Ia mulai menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dari 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selanjutnya, ia melanjutkan karier politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 hingga Oktober 2014 (Sindonews, 2021). Jokowi kemudian melangkah ke tingkat pemerintahan negara dengan terpilihnya sebagai Presiden Indonesia, yang menjabat dalam dua periode kepemimpinan, yaitu dari 2014 hingga saat ini (Presidenri).

2.2.2. Pencapaian selama Masa Kepemimpinan Politik Joko Widodo

2.2.2.1.. Wali Kota Solo

Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi mencatat sejumlah prestasi signifikan. Pertama, ia berhasil merelokasi hampir 1.000 pedagang kaki lima dari Monumen'45 Banjarsari ke Pasar Klithikan, Notoharjo tanpa menggunakan kekerasan, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap sulit atau

hampir mustahil dilakukan (Suarasurakarta, 2021) (BBC, 2011). Kedua, Jokowi mengimplementasikan program asuransi kesehatan bagi kalangan miskin serta penyediaan layanan kesehatan dengan pembiayaan dari APBD. Ketiga, ia mempermudah proses pembentukan KTP. Atas usaha-usahanya tersebut, Jokowi menerima penghargaan dari *Harian Republika* sebagai Tokoh Perubahan 2010 dan *Majalah Tempo* menobatkannya sebagai Tokoh Pilihan pada tahun sebelumnya (BBC, 2011).

Ketiga, ia berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Solo dari Rp 101 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 181 miliar pada tahun 2011, serta meluncurkan program branding “*Solo: The Spirit of Java*” untuk memperkuat citra Solo (Tribunnews, 2014). Kinerja Jokowi pada periode pertama jabatannya juga mendapatkan kepuasan tinggi dari masyarakat Solo, yang tercermin dari raihan suara sebesar 90,09% dalam Pilkada Kota Solo untuk periode kedua—sebuah angka yang sangat jarang dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia (Detiknews, 2014). Di akhir jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi terpilih menjadi Wali Kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan *World Mayor Project* tahun 2012 yang diadakan oleh *The City Mayors Foundation* yang berlokasi di Inggris atas kinerjanya sebagai Wali Kota Solo (VOA, 2013).

2.2.2.2. Gubernur DKI Jakarta

Sebelum menyelesaikan masa jabatan periode keduanya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dipanggil oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan akhirnya memenangkan jabatan tersebut. Beberapa program kerja terkenal yang dilakukannya antara lain penertiban

Waduk Pluit, yang sebelumnya dihuni sekitar 1.600 pemukim liar. Keberadaan pemukim liar ini menyebabkan waduk menjadi dangkal dan kurang efektif dalam membendung banjir (Tribunnews, 2014). Mirip dengan proyek pemindahan PKL di Solo, pembenahan pemukim liar ini juga dilakukan tanpa adanya kekerasan, yang cukup berbeda dengan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya (Tribunnews, 2014). Pemindahan dilakukan dengan merelokasi para pemukim liar ke rumah susun, dan proses ini tidak menciptakan gejolak (Tribunnews, 2014).

Selain itu, program pemindahan PKL Tanah Abang yang dikenal sebagai penyebab kemacetan dipindahkan ke Blok G Pasar Tanah Abang tanpa kekerasan serta pemberian tempat yang layak dan uang sewa yang cukup terjangkau (Tribunnews, 2014). Program lainnya termasuk penyediaan layanan kesehatan gratis bagi kalangan kurang mampu menggunakan Kartu Jakarta Sehat untuk sekitar 4,7 juta orang, serta mewajibkan rumah sakit swasta untuk menyediakan tambahan kelas 3 perawatan sebesar 40% (Tribunnews, 2014). Selain Kartu Jakarta Sehat, ada pula Kartu Jakarta Pintar yang digunakan sebagai alat bantu pelajar untuk mendapatkan dana bantuan di sektor pendidikan (Tribunnews, 2014). Dengan sederet program gebrakan tersebut, Jokowi mendapatkan prestasi sebagai salah satu nominasi penghargaan walikota terbaik di dunia: *World Major 2014* (Tribunnews, 2014). Prestasi ini diraihny saat ia baru menjabat selama 1,5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta (Tribunnews, 2014). Selain itu, Jokowi berhasil mengubah paradigma pejabat sebelumnya dengan menekankan bahwa pejabat adalah abdi rakyat yang wajib melayani dan bukan dilayani (Beritajakarta, 2014).

2.2.2.3. Presiden Republik Indonesia

Belum pula selesai dalam memimpin Jakarta khususnya pada tahun kerja kedua menuju tahun ketiga, ia kembali dipanggil partainya untuk menjadi calon presiden pada pilpres 2014 (Kompas, 2019). Selama kepemimpinannya di periode pertama, Jokowi bersama Kabinet Kerja Jokowi telah mendapatkan beberapa pencapaian seperti, pemerintahannya berhasil dalam penjagaan kestabilan tingkat inflasi di kisaran 3—4% dalam waktu empat tahun sejak tahun 2016. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik dimana tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2009—2015 Indonesia masih mengalami inflasi tahunan yang bergerak secara fluktuatif dalam rentang 3,98—6,41% dan angka tersebut menjadi angka inflasi terendah yang terjadi dalam satu periode kepemimpinan sejak era reformasi (CNBC, 2019) (Antaranews, 2019).

Dalam upaya menangani kemiskinan, pemerintahan Jokowi berhasil mengurangi kemiskinan menjadi single digit yang sekaligus menandai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia (Antaranews, 2019). Dimana pada Maret 2014 kemiskinan masih berkisar di 11,25% dan pada 2018 menunjukkan penurunan di angka 9,82% (Badan Pusat Statistik, 2015) (Badan Pusat Statistik, 2018). Selanjutnya, prestasi dalam perbaikan ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ranking Indonesia terus menunjukkan peningkatan hingga berada di kisaran 70-an pada tahun 2018 (CNBC, 2019). Dalam sektor pendidikan, pemerintahannya berhasil menaikkan angka rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia di atas 15 tahun dari 8,1 tahun menjadi 8,8 tahun (CNBC, 2019). Dalam sektor ekonomi, pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla berhasil membuat pertumbuhan ekonomi

Indonesia di level 5% dimana angka tersebut merupakan yang terbaik beriringan dengan ketidakpastian ekonomi global (AntaraneWS, 2019). Angka tersebut pula yang menjadikan Indonesia masuk tiga besar pertumbuhan ekonomi terbesar G20 setelah India dan Tiongkok (AntaraneWS, 2019). Selain itu, pemerintahannya mampu menurunkan angka pengangguran hingga menjadi yang terendah sejak 20 tahun terakhir dihitung dari 2019 (AntaraneWS, 2019).

Pada periode kedua, Jokowi dan Ma'ruf Amin terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa kepemimpinan 2019-2024 (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Dalam empat tahun masa pemerintahannya Indonesia telah menunjukkan kemajuan dan pembangunan secara signifikan (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Pencapaian-pencapaian tersebut antara lain seperti, pada sektor ekonomi Indonesia berhasil mencapai 5,3% dalam pertumbuhan ekonomi (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Hal ini didukung dengan kebijakan-kebijakan dan kinerja dalam kegiatan ekspor yang cukup kuat dan ekonomi dalam negeri yang cukup stabil (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Kemudian, keberhasilannya dalam melakukan hilirisasi yang menghasilkan suatu lonjakan dalam nilai ekspor hasil tambang dari USD 0,65 juta pada tahun 2017 hingga menjadi USD 5,95 juta (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Keberhasilan dari proyek hilirisasi ini juga menghasilkan dampak mendatang yang positif seperti, prediksi terhadap peningkatan PDB di angka Rp 11.000 triliun dan prediksi terciptanya 10,5 juta lapangan kerja (CNBC, 2023).

Selain itu, keberhasilan dalam sektor ekonomi juga terlihat dimana Indonesia berturut-turut selalu mencetak surplus selama 2022 dengan jumlah

surplus neraca perdagangan Indonesia yang mampu mencapai US\$ 54,46 miliar (CNBC, 2023). Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah (CNBC, 2023). Dalam sektor investasi, pemerintahan Jokowi berhasil mencapai nilai investasi sebesar Rp 1.207 triliun yang mana angka tersebut melebihi target awal yang telah ditetapkan pemerintah (CNBC, 2023). Pada, program pemerataan pembangunan, kepemimpinan Jokowi berhasil menurunkan jumlah desa-desa yang tertinggal secara signifikan yakni yang semula berjumlah 17.626 menjadi 6.749 desa (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 Indonesia dalam masa kepemimpinan Jokowi berhasil menjadi salah satu negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi di dunia dan penanganan pandemi Covid-19 terbaik di dunia (kompas, 2021).

Dengan demikian, selama masa kepemimpinannya, baik sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun Presiden Republik Indonesia, Jokowi tercatat menghasilkan sejumlah kinerja yang cukup signifikan—pencapaian yang jarang diraih oleh pejabat sebelumnya—dengan strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dari serangkaian keberhasilan tersebut, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan kebijakan hilirisasi barang mentah, terutama nikel, yang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan lapangan kerja (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

Dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi berkelanjutan barang tambang mentah, khususnya nikel, oleh Jokowi, kebijakan ini dapat dianggap sebagai tantangan sekaligus pengalaman yang sudah lama tidak dirasakan oleh Indonesia.

Kebijakan ini juga menekankan kekuatan dan sikap Indonesia kepada pihak eksternal, yang jarang diperlihatkan secara konsisten oleh pemimpin sebelumnya. Melalui kebijakan ini, penulis mengaitkan kepribadian Jokowi dengan keputusan-keputusan kebijakan yang diambilnya.

2.3. Kronologi Kasus Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel Mentah antara Indonesia, Uni Eropa dan WTO

Pengetahuan terkait kronologi pelaksanaan suatu kebijakan sangat penting untuk menunjang pemahaman terhadap konteks kasus yang sedang diteliti. Kronologi berisi urutan kejadian yang dapat menentukan momen-momen penting serta perubahan situasi yang memengaruhi perkembangan keputusan, sejalan dengan kesamaan pandangan antara Hermann dan pernyataan David Leonard (ahli teori kepribadian) yang menyatakan bahwa sifat manusia bersifat dinamis dan berubah berdasarkan situasi atau konteks (Academicus TR, 2021). Fungsi kronologi dan kesepahaman antara kedua tokoh tersebut mengenai pentingnya konteks menjadi dasar bagi peneliti untuk mencantumkan kronologi kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dari pemerintahan SBY hingga Jokowi. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan terkait kronologi kasus dapat meningkatkan pemahaman terhadap konteks dan mendukung pembangunan hasil penelitian yang lebih akurat..

2.3.1. Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Upaya pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor nikel mentah telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan penerbitan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU tersebut mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah, termasuk

nikel, dengan penekanan pada Pasal 103 yang mewajibkan pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri. Selain itu, Pasal 170 mengatur kewajiban pemurnian tersebut harus dilaksanakan paling lambat lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan (CNN Indonesia, 2019).

Kemudian, diterbitkan juga beberapa peraturan teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan kewajiban pemegang Kontrak Karya untuk memurnikan hasil pertambangan di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Minerba (CNN Indonesia, 2019). Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang kriteria peningkatan nilai tambah, yang membatasi penjualan atau ekspor mineral mentah hanya pada jumlah tertentu dan dalam bentuk hasil pengolahan, dengan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut (CNN Indonesia, 2019). Dengan kata lain, sejak 12 Januari 2017, hanya mineral hasil pemurnian yang diizinkan untuk diekspor (CNN Indonesia, 2019).

Dengan demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah untuk melarang ekspor hasil tambang dan mineral tanpa hilirisasi melalui UU No. 4 Tahun 2009. Namun, pada akhirnya, ia memutuskan untuk menunda pemberlakuan larangan ekspor tersebut. Penundaan ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti penolakan keras dari perusahaan tambang, khususnya Freeport, serta adanya ancaman pengaduan ke WTO (Liputan6, 2022).

2.3.2. Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Kemudian, pada tahun 2017, di masa pemerintahan Jokowi, dikeluarkan PP No. 1 Tahun 2017 yang merupakan revisi terhadap aturan sebelumnya. PP ini memberikan kelonggaran bagi para pengusaha tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah dengan beberapa syarat khusus. Pertama, para pengusaha tambang diharuskan mengubah izin kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) (CNN Indonesia, 2019). Kedua, setelah izin diubah, pengusaha tambang wajib membangun smelter pemurnian dalam waktu 5 tahun (CNN Indonesia, 2019).

Dalam rangka menggantikan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 yang mengatur relaksasi larangan, serta dilengkapi dengan ketentuan bahwa ekspor dengan kadar di bawah 1,7% masih diizinkan (Ahda, 2021). Selanjutnya, melalui Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, ditegaskan bahwa relaksasi tersebut dapat diberlakukan hingga 11 Januari 2022 (Ahda, 2021). Namun, akhirnya relaksasi tersebut dipercepat hingga 31 Desember 2019 melalui Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 (Ahda, 2021).

Kemudian, kebijakan selanjutnya yang melanjutkan rangkaian peraturan-peraturan sebelumnya mengenai pelarangan ekspor hasil tambang mentah adalah Permen Perdagangan No. 96 Tahun 2019 tentang syarat ekspor untuk produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, serta Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang pengaturan pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (CNBC Indonesia, 2023). Pada

1 Januari 2020, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan kembali secara keseluruhan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel berdasarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tersebut (Ahda, 2021). Pemberlakuan kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia banyak mengekspor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah (Ahda, 2021). Implementasi penuh kebijakan pelarangan ini pada akhirnya menyebabkan Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO (Ahda, 2021).

Tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa bukanlah hal yang mengejutkan mengingat status Uni Eropa sebagai salah satu negara importir terbesar nikel Indonesia. Penghentian ekspor nikel mentah sangat berdampak merugikan bagi industri baja di Eropa (Kompas, 2021). Pada 22 Desember 2019, Uni Eropa melalui duta besar Indonesia di Jenewa menyampaikan rencana UE untuk menggugat Indonesia. Sebelumnya, pada 12 Desember 2019, Jokowi telah lebih dulu mengeluarkan pernyataan yang berisi kesediaan Indonesia untuk menghadapi kemungkinan gugatan UE di WTO (tempo, 2021).

Secara singkat, pada 17 Oktober 2022, Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO mengeluarkan laporan bahwa Indonesia secara resmi terbukti melanggar aturan WTO, dengan kata lain Indonesia kalah dalam gugatan UE tersebut (DPR, 2022). Menurut Arifin Tasrif, Menteri ESDM, laporan kekalahan tersebut dirinci dalam sengketa DS 592, yang menjelaskan beberapa aturan yang dilanggar oleh Indonesia, seperti ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, yang tidak dapat ditepis oleh Pasal XI.2(a) dan XX(d) GATT 1994 (CNBC, 2023). Laporan panel tersebut juga menolak beberapa dasar pembelaan

Indonesia, seperti usaha Indonesia untuk menjaga dan membatasi jumlah cadangan nikel serta upaya untuk menerapkan praktik penambangan yang baik (*good mining practice*) (CNBC, 2023).

Beberapa aturan perundang-undangan yang dianggap melanggar aturan WTO antara lain UU No. 4 Tahun 2009, Permen ESDM No. 11 Tahun 2019, Permen No. 96 Tahun 2019, dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 (CNBC, 2023). Selain alasan-alasan tersebut yang membuktikan kekalahan Indonesia, terdapat juga alasan lain yang merupakan hasil penelusuran lebih lanjut oleh Kemendag RI, yaitu kondisi industri hilir Indonesia yang belum cukup siap (CNBC, 2023).

Menanggapi kekalahan pertama di WTO, pada Desember 2022 Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan banding kepada Appellate Body atau Badan Banding di WTO (Kemendag, 2023). Berdasarkan informasi dari Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, Badan Banding WTO diperkirakan akan terbentuk paling cepat pada pertengahan 2024 atau awal 2025. Saat ini, Indonesia masih menunggu pembentukan Badan Banding WTO dan akan diproses ketika mencapai gilirannya, yakni urutan antrian nomor 23 atau 24 (Kemendag, 2023). Dengan kata lain, kasus ini diperkirakan akan dilanjutkan pada pertengahan tahun 2026 (Kemendag, 2023).

Keberanian Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dalam menghadapi gugatan Uni Eropa terkait kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah merupakan tindakan yang cukup jarang diperlihatkan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya, baik dalam konteks kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah maupun kebijakan lainnya. Melihat perubahan yang ditunjukkan oleh

Indonesia selama kepemimpinan Joko Widodo, penulis tertarik untuk menyelidiki gaya kepemimpinan apa yang ada dalam kepemimpinan Jokowi yang mempengaruhi keputusan dalam melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Untuk menyelidiki hal tersebut, penulis menggunakan teori idiosinkratik oleh Margaret Hermann sebagai alat analisis.

2.4. Peran Sektor lain dalam Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel Mentah atau Kebijakan Hilirisasi Nikel Mentah

Bagian ini menjelaskan pengaruh sektor lain dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah atau kebijakan hilirisasi nikel mentah. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa topik atau kebijakan lain yang disampaikan dalam satu pidato tetap relevan untuk dianalisis bersama dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dalam konten tersebut.

Keterkaitan antara beberapa topik seperti investasi, sumber daya manusia, kawasan industri hijau Indonesia, infrastruktur, transformasi digital, reformasi birokrasi, dan prestasi dalam penanganan krisis di masa kepemimpinan Jokowi dapat dipahami sebagai bagian dari rencana lintas sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan program transformasi ekonomi Indonesia. Fokus pada topik-topik tersebut diharapkan menjadi kunci pembangunan ekonomi sebagai respons terhadap tren global, tidak hanya dalam menciptakan daya saing internasional, tetapi juga dalam mendukung prinsip inklusivitas dan keberlanjutan (Apindo, 2024).

Selain itu, keterkaitan antar topik tersebut juga dapat dihubungkan dengan teori idiosinkratik oleh Margaret Hermann, khususnya pada sifat kompleksitas konseptual dan orientasi pada penyelesaian tugas. Sifat kompleksitas konseptual mengacu pada sejauh mana pemimpin dapat memahami suatu isu dari berbagai sudut pandang (Hermann, 1999). Dalam konteks ini, sudut pandang dapat mencakup topik atau sektor lain yang relevan. Sementara itu, orientasi pada penyelesaian tugas mengacu pada kemampuan pemimpin untuk menggabungkan berbagai sektor atau topik sebagai upaya untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, sebagai indikator bahwa suatu tugas telah diselesaikan sesuai target.

2.4.1. Investasi sebagai Penunjang Pembangunan Hilirisasi Nikel Mentah

Hubungan antara kedua topik tersebut terletak pada adanya kebutuhan besar terhadap modal dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi, termasuk hilirisasi nikel mentah. Proyek hilirisasi adalah proyek besar yang memerlukan investasi modal yang signifikan (Suara.com, 2023). Secara umum, modal untuk berbagai proses pembangunan suatu negara dapat berasal dari dana dalam negeri dan dana eksternal. Dana dalam negeri dapat berupa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, serta penerimaan pembiayaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, dana eksternal, atau bantuan asing, dapat berasal dari individu atau warga negara asing, sektor swasta, dan/atau negara lain dalam bentuk investasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007).

Dalam rangka menarik investasi asing untuk proyek hilirisasi, Pemerintah Indonesia menerapkan dua skema utama: pemberian insentif fiskal melalui fasilitas *tax holiday* dan *Golden Visa* (Antaranews, 2024). Beberapa investasi utama dalam proyek ini melibatkan sektor-sektor seperti pembangunan smelter, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, pembangunan pabrik stainless steel, pengembangan infrastruktur penunjang, serta teknologi pengolahan nikel (Irawan, et al., 2024) (CNBC Indonesia, 2023) (iNews Kendari, 2022) (The National Bureau of Asian Research, 2022) (Media Nikel Indonesia, 2021).

2.4.2. Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berkualitas sebagai Penunjang Keberhasilan Hilirisasi

Hubungan antara kedua topik tersebut terletak pada kebutuhan untuk menunjang produktivitas industri smelter nikel melalui ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten sebagai operator alat berat (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2022).

Dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas SDM untuk proyek hilirisasi nikel mentah, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan unit pendidikan vokasi industri, mulai dari Diploma 1 (D1) hingga Magister Terapan (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2022). Kerja sama ini bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan antara sektor pendidikan dan sektor industri, serta menangani masalah pengangguran dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2022).

Selain menyangkut bidang pendidikan, program peningkatan kualitas SDM juga berhubungan dengan bidang kesehatan, khususnya terkait

pemberantasan stunting. Indonesia menghadapi masalah signifikan terkait usia angkatan kerja yang dipengaruhi oleh kasus stunting (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020). Oleh karena itu, penyelesaian masalah stunting di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing (E-Learning BKKBN, 2021).

2.4.3. Ketersediaan Infrastruktur sebagai Unsur Fundamental Pembangunan Area Industri Hilirisasi

Kedua topik tersebut memiliki hubungan satu sama lain mengingat Infrastruktur adalah satu diantara sektor penting penunjang produktivitas proyek hilirisasi disamping sektor SDM, teknologi dan pendanaan (Antaranews, 2023). Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah kebutuhan utama dalam pemenuhan aspek aksesibilitas dan transportasi, terutama terkait pengangkutan bahan mentah atau produk olahan (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2021). Terpenuhinya fasilitas infrastruktur yang memadai menjadi solusi dalam mengatasi masalah kenaikan biaya transportasi dan keterlambatan distribusi produk, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan dan daya saing produk (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2021). Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kawasan pengolahan nikel sudah terlaksana, seperti yang dilakukan oleh PLN terhadap PT Mitra Murni Perkasa (Bisnis.com, 2024).

2.4.4. Transformasi Digital sebagai Penunjang Produktivitas Industri Hilirisasi

Hubungan antara kedua topik tersebut terletak pada potensi peningkatan aspek konsumsi oleh transformasi digital (Antaraneews, 2023). Transformasi digital merupakan salah satu upaya dalam hal penyediaan jaringan dan di kawasan pertambangan nikel yang terletak di kawasan hutan dengan aksesibilitas sinyal yang sulit (Media Nikel Indonesia, 2022). Penerapan transformasi digital ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pengalaman konsumen, kemudahan pengelolaan dan pengendalian proses bisnis oleh para *stakeholder* terkait tanpa perlu terhambat oleh jarak yang jauh serta kualitas pelaksanaan atau produktivitas proses bisnis (Media Nikel Indonesia, 2022).

2.4.5. Peran Kawasan Industri Hijau sebagai Pendorong Daya Saing Produk Hilirisasi Indonesia

Hubungan antara kawasan industri hijau dan kebijakan hilirisasi nikel mentah terletak pada peran pembangunan kawasan industri hijau sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan. Pembangunan kawasan industri hijau dalam sektor hilirisasi nikel bertujuan untuk memperbaiki daya saing Indonesia dibandingkan negara lain dan memaksimalkan keuntungan seiring dengan tren transisi energi dan perubahan iklim (Mahardi, 2021). Kawasan industri hijau ini berorientasi pada penciptaan *Smart-Eco Industrial Parks* melalui penerapan prinsip-prinsip industri ramah lingkungan, termasuk *smart energy management* dan *smart water management*, yang didukung oleh berbagai teknologi digital dan inovasi (Mahardi, 2021). Selain itu, pembangunan kawasan industri hijau

merupakan upaya nyata Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan penciptaan produk-produk ramah lingkungan (Mahardi, 2021).

2.4.7. Reformasi Birokrasi atau Deregulasi sebagai Upaya Penciptaan Lingkungan yang Nyaman bagi Investor

Hubungan antara reformasi birokrasi dan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah atau kebijakan hilirisasi nikel mentah terletak pada peran reformasi birokrasi dalam menyederhanakan prosedur sebagai upaya untuk menarik investasi. Kualitas prosedur perizinan investasi mempengaruhi kepastian hukum bagi calon investor. Semakin sederhana dan minim kerumitan regulasi, semakin besar kecenderungan investor merasa aman untuk berinvestasi di Indonesia (Fauzi, 2024). Selain itu, reformasi birokrasi sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan regulasi guna meningkatkan pelayanan kepada investor (Sekretariat Presiden, 2019) serta mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah dan hilirisasi nikel mentah (Sekretariat Presiden, 2023).

2.4.8. Peran Prestasi Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Jokowi sebagai Penarik Investor.

Indonesia telah menunjukkan prestasi signifikan selama masa kepemimpinan Jokowi, termasuk berhasil menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19. Bank Dunia mengakui pencapaian Indonesia dalam melewati pandemi dengan lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Indonesia mencatatkan total kasus dan angka kematian COVID-19 yang lebih rendah

dibandingkan Inggris, Brasil, India, dan Amerika Serikat (CNBC Indonesia, 2022) (Kantor Staf Presiden, 2022).

Selain itu, dalam konteks krisis pangan global yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, Indonesia menerima pengakuan dari *International Rice Research Institute* (BBC News Indonesia, 2022). Sertifikat tersebut mengonfirmasi bahwa sistem ketahanan pangan Indonesia berada dalam kondisi sangat baik dan bahwa swasembada beras di Indonesia telah dimulai sejak 2019 (BBC News Indonesia, 2022). Sementara negara lain menghadapi kekurangan pangan, Indonesia diakui telah mencapai swasembada beras dan memiliki sistem ketahanan pangan yang efektif (Kadin Indonesia, 2022).

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi merupakan prestasi penting di bawah kepemimpinan Jokowi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5%, dengan tingkat inflasi sebesar 2,68% pada Januari 2020 (CNBC Indonesia, 2020) (Bank Indonesia, 2020). Angka pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penurunan signifikan dalam angka inflasi tersebut diungkapkan oleh Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Tahun 2020 (Sekretariat Presiden, 2020).

Selanjutnya, pernyataan *Managing Director* IMF, Kristalina Georgieva, bahwa Indonesia adalah salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi global, serta pencapaian Indonesia dalam menjaga surplus perdagangan selama 31 bulan hingga 21 Desember 2022, menunjukkan pencapaian penting lainnya dalam masa pemerintahan Jokowi. Kondisi sosial, politik, dan keamanan yang dianggap baik

oleh para investor, ditambah dengan kepemimpinan Indonesia di G20 dan peran sebagai Ketua ASEAN, semakin memperkuat pencapaian tersebut (KOMPAS TV, 2022) (Sekretariat Presiden, 2022) (Sekretariat Kabinet RI, 2023).

Prestasi-prestasi ini memiliki hubungan langsung dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah atau hilirisasi nikel mentah di Indonesia. Keberhasilan tersebut berfungsi sebagai modal untuk menarik investor dan membangun kepercayaan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan serta menyukseskan proyek transformasi ekonomi, khususnya yang terkait dengan hilirisasi nikel mentah (Sekretariat Presiden, 2020). Dengan demikian, melalui alasan keterkaitan beberapa topik dengan topik pelarangan ekspor atau hilirisasi nikel mentah diatas, peneliti menggunakan konten baik pidato maupun wawancara yang didalamnya terdapat pada topik-topik selain topik pelarangan ekspor atau hilirisasi nikel mentah sebagai bahan untuk analisis konten.